

Bulan :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |          |            |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas  | Sindo    | Tempo      |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

## APBD 2020 Diprediksi Molor

### Dewan Belum Bahas KUA-PPAS

**JAKARTA** - Setelah mengukuhkan lima pimpinan definitif dalam sidang paripurna, DPRD DKI diharapkan segera fokus bekerja. Khususnya membahas Kebijakan

Umum Anggaran-Prioritas Plafon (KUA-PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020. Tujuannya agar Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) bisa mengesahkan akhir November 2019 ini.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD DKI 2020 yang diprediksi besarnya mencapai Rp96 triliun sudah selayaknya menjadi prioritas.

Pasalnya, sambung Idris, sejak anggota DPRD periode 2019-2024 dilantik sebulan yang lalu, pembahasan mengenai hal itu belum terlaksana.

"Sudah sebulan berlalu begitu saja sejak kami dilantik karena menunggu nama pimpinan definitif, akibatnya agenda yang menjadi tanggung jawab DPRD molor terlalu lama, khususnya pembahasan APBD 2020 dan juga pemilihan Wagub," kata Idris kepada INDOPOS di Gedung DPRD

DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Menurut Idris, keterlambatan lebih dari satu bulan DPRD DKI menetapkan pimpinan definitif harus berujung pada kompensasi percepatan pembahasan agenda-agenda dewan yang layak menjadi prioritas ■

Pihaknya berharap, setelah pimpinan DPRD definitif ditetapkan, penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) dapat diintensifkan Oktober 2019 ini.

"Jika pembahasan AKD kembali molor, maka ruang pembahasan APBD 2020 hanya akan semakin sempit dan mustahil menghasilkan pembahasan yang berkualitas," tutur Idris.

Dia mengungkapkan, dari total 106 anggota DPRD DKI periode 2019-2024, sebanyak 59 diantaranya merupakan wajah baru. Termasuk delapan anggota dari PSI.

Dengan begitu, pihaknya mendorong agar seluruh fraksi di dewan untuk fokus membahas APBD 2020 hingga November mendatang.

Setidaknya, sambung Idris, fraksi-fraksi mulai mempelajari usulan anggaran dan melakukan pembahasan kritis dan teliti merespons draft usulan dari gubernur.

"Kalau DPRD yang baru mau menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya, inilah saatnya. Pembahasan

APBD 2020 ini ajang pembuktian kualitas para anggota DPRD yang kembali terpilih maupun yang baru terpilih," tegas Idris.

Hal serupa dilayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diapun berharap agar pimpinan DPRD yang baru bisa bekerja sama lebih baik dalam upaya membangun Jakarta.

"Hubungan kerja yang sudah baik selama ini harus mampu meningkat menjadi lebih baik, terutama dalam hal dukungan untuk program peningkatan kesejahteraan," kata Anies kepada wartawan di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Sebab, kata Anies, tugas berat yang menunggu DPRD setelah pengesahan Mendagri adalah pembahasan Rancangan APBD 2020.

Anies berharap, Rancangan APBD bisa dibahas lebih cepat dan lebih rinci. "Kita harap APBD disahkan tepat waktu sehingga pada awal tahun APBD bisa langsung berjalan," imbuh dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan, dirinya sangat percaya jika Prasetyo Edi Marsudi yang sama-sama berasal dari Fraksi PDI Perjuangan bisa berkomunikasi dengan baik kepada Pemprov DKI dan sejumlah anggota DPRD DKI agar dapat membangun ibu kota yang lebih baik lagi.

Oleh sebab itu, kata Kent, sa-paan akrabnya, Prasetyo dapat memperbaiki APBD yang pro rakyat, sesuai apa yang dihar-

apkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ke depannya semoga beliau dapat membenahi APBD yang pro rakyat, agar dapat memperbaiki kesehatan, pendidikan, banjir, dan kebersihan di Jakarta," tukas dia kepada INDOPOS di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). (aen)